



Prosedur Penerbitan *Certificate Of Pratique* (COP) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Belawan Oleh PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan

Ekin Lesmana Ginting^{1*}, Dirhamsyah², Masringgit Marwiyah Nst³

^{1,2,3} Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Alamat: Jl. Pertempuran No.125, Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara
20116

Korespondensi penulis: ekinlesmanaginting@gmail.com

Abstract. *The purpose of writing this paper is to find out the Procedure for Issuing a Certificate of Practice (COP) at the Belawan Port Health Office by PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan. The author collected data using two research methods, namely the field method (Field Research) and the library method (Library Research). The results of this research are the Procedure for Issuing a Certificate of Practice (COP) at the Belawan Port Health Office by PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan starts from submitting an application via the SINKARKES application (sinakarkes.kemkes.go.id). Then the agent logs in using the company account that has been registered in the SINKARKES application, after logging in the agent makes a request for the PNPB Certificate of Practice (COP) / Port Health Quarantine Certificate (PHQC) billing issuance service, then the company agent fills in the data and uploads ship documents such as: MDH (Maritime Health Declaration), SSCC/SSCEC, Medical Certificate/Drug Certificate (P3K), crew list, voyage memo, and last port clearance. After all data has been filled in completely and correctly, the agent can send the request by clicking create billing, the SINKARKES application will issue PNPB billing which must be permitted by PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan to carry out ship inspections together with the Port Health Quarantine.*

Keywords: *Procedure, Publishing, Certificate, Health, Port*

Abstrak. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penerbitan Certificate of Pratique (COP) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Belawan Oleh PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan dua metode penelitian yaitu metode lapangan(Field Research) dan metode pustaka(Library Research). Hasil penelitian ini adalah Prosedur Penerbitan Certificate of Pratique (COP) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Belawan Oleh PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan dimulai dari pengajuan permohonan melalui aplikasi SINKARKES (sinakarkes.kemkes.go.id). Kemudian agen login menggunakan akun perusahaan yang sudah terdaftar di aplikasi SINKARKES, setelah login agen membuat pengajuan permohonan layanan penerbitan billing PNPB Certificate of Pratique (COP) / Port Health Quarantine Certificate (PHQC), selanjutnya agen perusahaan mengisi data serta mengunggah dokumen kapal seperti : MDH (Maritime Declaration of Health), SSCC/SSCEC, Medicine Certificate/ Sertifikat obat-obatan (P3K), crew list/daftar awak kapal, voyage memo, dan last port clearance. Setelah semua data diisi dengan lengkap dan benar agen dapat mengirim permohonan dengan meng-klik create billing maka aplikasi SINKARKES akan mengeluarkan billing PNPB yang harus dibayarkan oleh PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan untuk melakukan pemeriksaan kapal bersama pihak Kekeparantaraan Kesehatan Pelabuhan.

Kata kunci: Prosedur, Penerbitan, Sertifikat, Kesehatan, Pelabuhan

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeparantaraan kesehatan yang mengamankan KKP untuk menggerakkan kekeparantaraan kesehatan yaitu upaya cegah dan tangkal keluar atau masuknya Penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Certificate of Pratique (COP) atau Surat Persetujuan Karantina kesehatan dibutuhkan untuk memastikan kapal yang datang kel pelabuhan tidak membawa Penyakit menular atau potensial wabah.

Certificate of Pratique (COP) merupakan dokumen kesehatan yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina kesehatan (BBKK) setelah kapal diperiksa oleh tim Kantor kesehatan Pelabuhan (KKP). Dimana objek pemeriksaan dilakukan terhadap orang, barang maupun alat angkut melalui pintu masuk/keluar negara di wilayah pelabuhan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Indonesia terlindungi kesehatannya.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian perusahaan Pelayaran

Menurut Est Kalangi (2024:50) perusahaan pelayaran adalah entitas yang mengoperasikan kapal, baik milik sendiri maupun sewa, yang bertindak sebagai pihak pengangkut.

b. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP):

Berdasarkan Masrizal dan Muhammad Alfarizi (2022:8), KKP merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas mencegah dan mengendalikan penyakit serta risiko kesehatan di pelabuhan. Kepala KKP mendapat pembinaan administratif dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan pembinaan fungsional dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):

Menurut Sutarman (2021:24-25), PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 1997.

d. Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKes):

Menurut Yohanes (2024:1), SINKARKes adalah media pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi informasi yang mendukung kegiatan karantina dan pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan, serta menghubungkan antarkantor kesehatan pelabuhan di Indonesia.

e. Certificate of Pratique (COP):

Berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional 2005, COP adalah izin bagi kapal untuk memasuki pelabuhan, menurunkan/menaikkan penumpang, serta membongkar/memuat kargo.

f. Billing:

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan untuk pembayaran, mencakup total biaya barang atau jasa yang ditagihkan kepada pelanggan.

g. Prosedur:

Menurut KBBI, prosedur adalah tahapan sistematis untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau memecahkan masalah secara bertahap.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan dua model yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi pendukung penelitian ini yaitu:

a. Metode Lapangan (Field Research)

Model ini penulis mengamati secara langsung bagaimana prosedur Penerbitan Certificate of Pratique (COP) di Kantor kesehatan Pelabuhan Belawan Oleh PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan Mulai dari Penerbitan billing, pembayaran, pengajuan permohonan Penerbitan Certificate of Pratique (COP), pelaksanaan pemeriksaan kapal oleh pihak Balai Besar Karantina kesehatan (BBKK) hingga Penerbitan Certificate of Pratique (COP) yang telah diamati secara langsung oleh penulis.

b. Metode Pustaka (Library Research)

Model ini penulis memperoleh data dari membaca buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, sumb lain sepi jurnal dan intan. Model ini sangat membantu pulis dalam memahami istilah-istilah sta teori penjelasan dari Pengertian yang tidak dapat dijelaskan pada saat pengamatan di lapangan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permohonan Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

Prosedur Penerbitan Certificate of Pratique (COP) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Belawan:

a. Persiapan Awal

Sebelum mengajukan permohonan COP, langkah pertama adalah membuat billing melalui aplikasi SINKARKes (sinkarkkes.kemkes.go.id).

b. Pengajuan Billing

- 1) Membuat permohonan di aplikasi SINKARKes
- 2) Mengunggah dokumen:
 - a) Deklarasi Kesehatan Kapal (MDH)
 - b) Sertifikat Kontrol Sanitasi Kapal (SSCC/SSCEC)
 - c) Sertifikat Obat-obatan

- d) Daftar Awak Kapal
 - e) Memo Perjalanan
 - f) Surat Keterangan Pelabuhan Terakhir
- c. Sistem akan menerbitkan billing PNBP dengan metode pembayaran:
- 1) Teller bank
 - 2) Mobile banking
 - 3) Internet banking
- d. Tarif COP Berdasarkan Ukuran Kapal
Tarif bervariasi dari Rp. 50.000 hingga Rp. 300.000 sesuai tonase kapal.
- e. Proses Penerbitan COP
- 1) Jika Kapal Dinyatakan Sehat:
 - a) Pelayaran membuat surat permohonan maks. 1x24 jam
 - b) Kantor Kesehatan Pelabuhan menerima surat
 - c) Pemeriksaan kapal
 - d) Penerbitan COP
 - 2) Jika Kapal Terjangkit:
 - a) Prosedur sama dengan kapal sehat
 - b) Dilakukan tindakan karantina
 - c) Penerbitan COP sesuai protokol
 - 3) Catatan Penting:
 - a) Kapal asing wajib mengibarkan bendera kuning
 - b) COP diterbitkan setelah pemeriksaan kesehatan

Dokumen Kesehatan Yang Diperlukan Dalam Proses Penerbitan Certificate Of Pratique (COP)

a. Maritime Declaration of Health (MDH)

MDH adalah dokumen resmi sesuai Lampiran 8 Peraturan Kesehatan Internasional yang mencatat kondisi kesehatan di atas kapal selama pelayaran hingga tiba di pelabuhan tujuan.

b. Sertifikat Sanitasi Kapal (SSCC/SSCEC)

Dokumen yang menjelaskan kondisi sanitasi kapal, terdiri dari:

- 1) Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC): diberikan kepada kapal yang dinyatakan bebas tindakan sanitasi
- 2) Ship Sanitation Control Certificate (SSCC): diberikan kepada kapal yang telah menjalani tindakan sanitasi

Kapal yang berlayar di perairan Indonesia wajib memiliki sertifikat ini dengan masa berlaku 6 bulan.

c. Sertifikat Obat-obatan

Dokumen yang dikeluarkan karantina kesehatan untuk memberikan jaminan pertolongan medis dasar bagi awak kapal yang sakit atau mengalami kecelakaan.

d. Daftar Awak Kapal (Crew List)

Catatan resmi anggota awak kapal yang berisi informasi nama, posisi, dan kebangsaan. Dokumen ini mencatat hak dan kewajiban awak kapal serta memberikan kepastian kedatangan kapal.

e. Voyage Memo

Dokumen yang mencantumkan daftar 10 pelabuhan terakhir yang disinggahi kapal beserta keterangan muatan yang diangkut.

f. Last Port Clearance

Dokumen resmi yang dikeluarkan Syahbandar sebagai bukti kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan kewajiban administratif sebelum meninggalkan pelabuhan.

Instansi yang terkait dalam proses Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

Proses penerbitan Certificate of Pratique (COP) melibatkan lembaga kesehatan khusus, yaitu Balai Besar Kekearifan Kesehatan (BBKK) atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Institusi ini memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit serta faktor risiko kesehatan melalui lalu lintas keluar masuk wilayah.

Struktur organisasi KKP dipimpin oleh seorang kepala dengan mekanisme pembinaan ganda. Secara administratif, kepala KKP dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, sementara secara fungsional mendapatkan pembinaan dari Direktorat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tugas pokok mereka adalah melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengeluarkan dokumen resmi yang menjamin tidak adanya risiko kesehatan saat kapal memasuki atau meninggalkan pelabuhan.

Hambatan yang dialami dalam Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

Adapun hambatan yang pernah dialami oleh penulis selama melaksanakan praktek darat utama dalam proses Penerbitan Certificate of Pratique (COP) adalah sebagai berikut

- a. Masalah jaringan yang membuat ag tidak dapat login ke aplikasi SINKARKes pada saat pengajuan billing Certificate of Pratique (COP)
- b. Terjadinya human or pada saat penginputan data kapal
- c. Kesenjangan komunikasi antara pihak ag dan Nahkoda kapal juga sering tidak memperhatikan jadwal waktu yang baik dalam memberikan dokumen-dokumennya kepada ag yang mengakibatkan tidak sesuai dengan jam kerja kantor pada umumnya.

Solusi mengatasi kendala dalam pengurusan Certificate of Pratique

Tata Cara yang dilakukan penulis ketika menghadapi hambatan diatas adalah sebagai berikut:

- a. mengupgrade jaringan menjadi lebih cepat sehingga tidak terjadi masalah jaringan di kemudian hari pada saat pengajuan permohonan melalui sistem SINKARKes
- b. menghubungi pihak yang bersangkutan untuk melakukan revisi dan melakukan pemeriksaan ulang untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh human eror
- c. membuat pemberitahuan kepada Nahkoda minimal 2 hari sebelum pelayanan jasa untuk mengirim siap data yang diperlukan dalam pengurusan sertifikat Certificate of Pratique (COP)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prosedur Penerbitan Certificate of Pratique (COP) di Kantor kesehatan Pelabuhan Belawan Oleh PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan dimulai dari pengajuan permohonan melalui aplikasi SINKARKes (sinakarkes.kemkes.go.id). Ag kapal mengunggah data dokumen septi : MDL (maritime Declaration of Health), SSCC/SSCEC, Machine Certificate, crew list, voyage memo, last port clearance. Aplikasi SINKARKes akan mengeluarkan billing PNBPN yang harus dibayarkan oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan untuk pelaksanaan pemeriksaan kapal bersama pihak Kekarantinaan kesehatan Pelabuhan

Saran

Sebaiknya sebelum permohonan Penerbitan Certificate of Pratique (COP) pada aplikasi SINKARKes sebelum di submit ada sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh human or. Oleh karena itu dengan penulisan penelitian ini dimana membahas tentang prosedur Penerbitan Certificate of

Pratique (COP) di Kantor kesehatan Pelabuhan Belawan Oleh PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan.

DAFTAR REFERENSI

- Chandradja, J., & Sabila, F. H. (2024). Prosedur perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi kapal melalui sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(3), 261–267.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kalangi, E. S. T. M. H. (2021). *Administrasi Pelayaran Niaga*. Surabaya: Sucofindo.
- Kesuma, N., Sabila, F. H., & Chrisnatalanta, C. (2022). Sistem pengurusan sign on buku pelaut crew kapal di Kantor KSOP Khusus Batam pada PT. Putra Anambas Shipping Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 411–416.
- Lassel, D. A. (2014). *Manajemen Kepelabuhanan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Masrizal, & Alfarizi, M. (2022). *Manajemen Karantina Pelabuhan*. Jawa Tengah: Purbalingga Eureka.
- Nyoman, S., et al. (2022). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Sang Bant: Sada Kurnia Pustaka.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 17/PB/2021 tentang Tata Cara Penerbitan Kode Billing melalui Billing Perbendaharaan.
- Peraturan Kesehatan Internasional (International Health Regulation). (2005). Definisi Free Pratique.
- Roy, Y., et al. (2024). Evaluasi keberhasilan implementasi sistem informasi karantina kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. *Jurnal Mara Ilmu*, 18(2).
- Sabila, F. H., & Rakawitan, F. (2023). Persiapan peralatan dan dokumen sebelum melaksanakan aktivitas bongkar curah kering pada PT Wahana Intradermaga Niaga Belawan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 509–519.
- Sitompul, G. F., Deliana, M. K., & Sabila, F. H. (2024). Transportation process of container goods from container freight station to container yard at Port of PT. Elang Sriwijaya Perkasa Palembang. *PPIMAN: Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 296–300.
- Sutarman, H., & Isti'anah, H. (2021). *Manajemen Penerimaan Negara Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Organisasi Perusahaan.
- Wahni, S., Dirhamsyah, D., Handayani, I., & Sabila, F. H. (2024). Penggunaan aplikasi SIMKAPEL dalam pengurusan sertifikat safe manning TB. Samudera Tirta oleh PT. Berlia Ocean Shipping Dumai. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 264–276.